

**SKRIPSI**

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN APARAT  
INSPEKTORAT TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GOWA**

**SARTIKA  
10573 04333 13**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 560 112 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat  
Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa**

Nama : **SARTIKA**

NIM : **105730433313**

Jurusan : **AKUNTANSI**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**

Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan dosen  
penguji Skripsi Strata Satu (S-1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 pada Program  
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Makassar.

Makassar, 07 Oktober 2017

**Menyetujui:**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

  
**Drs. H. Mahmud Nuhung, MA**  
KTAM : 497 764

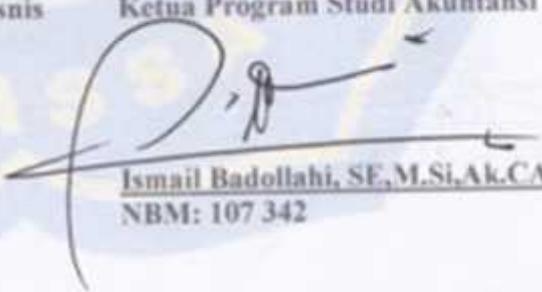
  
**Muttiarni, SE, M.Si**  
NBM : 1172273

**Mengetahui:**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Ketua Program Studi Akuntansi**

  
**Ismail Rasulong, SE, M.M**  
NBM: 903078

  
**Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA**  
NBM: 107 342



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

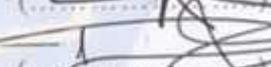
Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Sartika, Nim 105730433313 ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1439 H/2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.

Makassar, 17 Muharram 1439 H  
07 Oktober 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE.,MM   
(Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM   
(Dekan Fakultas Ekonomi) (.....)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM   
(Wakil Dek. I Fak. Ekonomi) (.....)
4. Penguji
  - a. Muttiarni, SE.,M.Si 
  - b. Muchriana Muchran, SE., M.Si 
  - c. Samsul Rizal, SE., MM 
  - d. DR. HJ. Rulianty, MM. 

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah, yang hanya kepada-Nya aku berlindung dari dosa-dosa yang pernah kuperbuat dan kepada-Nya pula aku memohon untuk dijauhkan dari rezeki yang haram. Dialah yang Maha Adil dan tiada keadilan kecuali berasal dari-Nya. Segala puji bagi-Nya atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kami dan penulis mendapatkan petunjuk dan bimbingan untuk mampu merangkai, mengungkapkan ide, gagasan serta menguak sebagian kecil ilmu Allah yang ada di dunia ini.

Selawat dan salam insya allah tetap tercurah bagi pemimpin- pemimpin besar kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, kepada para pengikutnya hingga yang terakhir nanti.

Akhirnya penulis mengucapkan terimah kasih kepada beberapa pihak antara lain :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Dekan Fakultas Ekonomi Ismail Rasulong, SE.,MM
3. Ketua Jurusan Akuntansi Ismail Badollahi, SE, M. Si. Ak. CA
4. Drs. H. Mahmud Nuhung. MA selaku pembimbing I dan Ibu Muttiarni, SE., M. SI selaku pembimbing II atas kesediaan beliau meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Teristimewa untuk orang tuaku, terimah kasih atas kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang berlimpah yang selalu di berikan.
6. Seluruh staf pengajar dan staf administrasi dalam lingkup Universitas Muhammadiyah Makassar pada khususnya yang telah mendidik dengan

ilmu pengetahuan, baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penulisan skripsi ini.

7. Teman-teman dan sahabat yang selalu memberikan dorongan, dan seluruh keluarga yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh pendidikan.

Semoga segala bantuan yang telah penulis terima bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan akan dibalas dengan balasan yang terbaik nantinya, aamiin. Penulis menyadari bahwa pasti banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini, walaupun demikian semoga dapat memberikan sumbangsih bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan para pembaca.

Makassar, Mei 2017

Penulis

## ABSTRAK

**Sartika. 2017.** Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. ( Dibimbing Oleh **Ibu Muttiarni Dan Bapak H. Mahmud Nuhung** ).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Profesionalisme terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017, (2) Pengaruh Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2017, Populasi penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kab. Gowa. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 30 orang yang bersedia menjadi Responden. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik dan analisa regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profesionalisme (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai hitung  $0.182 > 0.05$  dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dimana  $0.027 < 0.05$  (5%)

**kata kunci :** Profesionalisme, Pengetahuan Aparat Inspektorat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	2
<b>II. TINAJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Profesionalisme .....	4
B. Aparat inspektorat .....	6
C. Pengetahuan Tentang Pengelolaan keuangan Daerah.....	8
D. Review Atas LKPD( Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).....	11
E. Kualitas LKPD( Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).....	13
F. Peneliti Terdahulu .....	21
G. Kerangka Fikir .....	25
H. Hipotesis .....	26

### **III. METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan waktu penelitian .....	27
B. Populasi Dan Sampel .....	27
C. Jenis Dan Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data .....	29
E. Operasional Variabel Penelitian .....	30
F. Teknik Analisi Data .....	33

### **BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Singkat Kantor Inspektorat Kab. Gowa .....	39
B. Visi Dan Misi .....	39
C. Struktur Organisasi.....	40
D. Tugas Dan Fungsi.....	42

### **BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Karakteristik Responden .....	60
B. Hasil Pengujian Analisis .....	62

### **BAB VI. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

### **DAFTAR PUSTAKA .....**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	1. Peneliti Terdahulu .....	21
Tabel	2. Variabel Dan Indikator .....	32
Tabel	3. Instrument Pengukuran Variabel .....	33
Tabel	4 Demografi Responden .....	60
Tabel	5. Hasil Uji Validitas instrumen .....	62
Tabel	6. Hasil Uji Reabilitas.....	64
Tabel	7. Hasil uji multikoloneritas .....	68
Tabel	8. Hasil Uji koefesien determinasi.....	70
Tabel	9. Hasil uji simultan (ujif).....	72
Tabel	10. Hasil uji persial.....	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Fikir .....	25
Gambar 2. Struktur Organisasi .....	41
Gambar 3. Histogram .....	65
Gambar 4. Normal P.P Plot Of Regression Standardized Residual.....	66
Gambar 5. Scatter Plot.....	67

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Izin Penelitian Ketua LP3M Unismuh Makassar
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sulawesi –Selatan.
3. Rekomendasi Penelitian
4. Angket Kuesioner
5. Tabulasi Data Responden
6. Hasil Uji Validitas instrument
7. Hasil Uji Reabilitas
8. Hasil uji multikoloneritas
9. Hasil Uji koefesien determinasi
10. Hasil uji simultan (ujif )
11. Hasil uji persial

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa sekarang ini arah internal auditor bukan lagi sebagai *watchdog* yang hanya bertugas mengawasi berjalannya system dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di setiap instansi suatu daerah, tetapi juga sebagai konsultan yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan demikian peranan internal auditor sangat diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Dengan melakukan peranannya dalam mendorong pelaksanaan manajemen resiko pengawasan, dan proses tata kelola. Lebih lanjut peranan audit internal juga dapat dilihat dari fungsi *insight*, *oversight* dan *forsight*. Fungsi *insight* adalah pelaksanaan pengawasan operasional ke dalam organisasi, yaitu auditor internal mengawasi pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan ekonomis organisasi. Fungsi *oversight* adalah fungsi pengawasan atas keseluruhan proses kegiatan organisasi, termasuk kekuatan dan kekurangan. Sedangkan *forsight* diartikan auditor internal harus mempunyai pandangan ke depan, memberikan prediksi sekaligus langkah antisipasi bagi kemajuan organisasi.

Salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah adalah inspektorat daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah maupun tugas lain yang diberikan kepala daerah sehingga dalam

tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal pada umumnya. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah **“Apakah Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Gowa”**

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

#### **a. Bagi peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah yang terdapat dalam pemerintahan daerah sebagai wujud kepedulian akan akuntabilitas

dan transparansi pemerintahan daerah terutama untuk pelaporan keuangan pemerintah daerah.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, literature – kepustakaan, informasi, dan pengetahuan bagi berbagai pihak dan dapat digunakan untuk bahan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Aparat Inspektorat

Sebagai masukan dalam mendukung peranan aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah dan pembinaan guna mewujudkan *good governance*. Sehingga aparat Inspektorat diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya

d. Bagi Aparat pemerintahan

Sebagai informasi serta masukan dalam mengevaluasi tugas aparat Inspektorat dalam melakukan reuiu Laporan Keuangan Pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Profesionalisme**

##### **1. Definisi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia profesionalisme adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing, sementara itu Kurniawan (2005: 73) menyatakan bahwa profesionalisme merupakan seseorang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya.

Dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan bahwa “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melakukan tugas pemeriksaan”. Menurut Arens (2010, dalam Rezky Alvino Subagjo, 2013), profesionalisme adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang dan lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar memenuhi Undang- Undang dan peraturan masyarakat. Profesionalisme dapat dicerminkan ke dalam lima hal, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan sesama profesi.

Untuk dapat mewujudkan profesionalisme, aparat Inspektorat secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama harus mempunyai (Kuntadi, 2011 - dalam Subagjo, 2013):

1. Pengetahuan yang memadai dalam bidang tugasnya yaitu pengetahuan mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan spesialisasinya,
2. Perilaku yang independen, jujur, obyektif, tekun, dan loyal,
3. Kemampuan mempertahankan kualitas profesionalnya melalui pendidikan profesi lanjutan yang berkesinambungan,
4. Kemampuan melaksanakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama,
5. Kecakapan dalam berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalismenya, aparat Inspektorat harus memahami prinsip-prinsip pelayanan kepentingan publik serta menjunjung tinggi integritas, obyektivitas, dan independensi. Selain itu perlu memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik. Dalam mempertahankan profesionalismenya, aparat Inspektorat harus mengambil keputusan yang konsisten dengan kepentingan publik dalam melakukan pemeriksaan, tidak berpihak, bersikap jujur dan terbuka kepada entitas yang diperiksa dan para pengguna laporan hasil pemeriksaan serta bertanggung jawab untuk menggunakan pertimbangan profesionalismenya dalam menetapkan lingkup

dan metodologi, menentukan pengujian dan prosedur yang akan dilaksanakan, melaksanakan pemeriksaan, dan melaporkan hasilnya (Standar Pemeriksa Keuangan Negara , 2007).

## **B. Aparat Inspektorat**

Inspektorat merupakan instansi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengawasan di daerah. Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dalam rangkapeningkatan pendayagunaan Aparatur Negara dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang “Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009”, pasal 1 yaitu Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahandaerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian merupakan suatu kegiatan/proses untuk meyakinkan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencananya. Dengan pengendalian, manajemen dapat (1) mengenali masalah yang ada untuk kemudian melakukan tindakan penyelesaian yang diperlukan dan (2) mengenali hasil yang dicapai secara efisien dan efektif untuk kemudian memberi penghargaan seperlunya. Fungsi pengawasan lebih bertujuan untuk menjamin pencapaian tertentu secara optimal (Tarigan, 2007, dalam Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2014 : 368). Pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah menurut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah adalah Sebagai berikut :

1. Pasal 1: anggaran pendapatan dan belanja Negara ( APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah ( APBD)

2. Pasal 8, ayat 1, 2, dan 3

Ayat 1:

Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah.

Ayat 2:

Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk

Ayat 3:

Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD

### C. Pengetahuantentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditinjau dari sisi keilmuan ekonomi dan manajemen disebut sebagai manajemen keuangan publik (*public finance or public financial management*). Berdasarkan literature tentang *public financial management*, masalah utama dalam pengelolaan keuangan negara mencakup masalah, antara lain :

1. Akuntansi (*accounting*)
2. Anggaran (*budgeting*)
3. Pengendalian/pengadaan (*controlling/purchasing*)
4. auditing/pemeriksaan/pengawasan (*auditing*)

keempat masalah utama tersebut bila dikelola dengan baik maka akan dicapai suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih populer dengan istilah system pengelolaan keuangan public atau pemerintah yang transparan dan akuntabel. Halim & Kusufi (2014:180)

Pengetahuan memegang peranan penting agar suatu organisasi dapat berjalan secara maksimal. Aparat Inspektorat seharusnya mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik agar dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Menurut Halim (2002:4) mengelola keuangan daerah berarti mengelola anggaran daerah, sebab segala aktivitas daerah (pemerintah daerah) mayoritas terkait dengan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas yang nota bene tersaji dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Menurut Widjaja (2014 : 152-153) Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan daerah tersebut mengatur tentang:

1. Kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD
2. Kewenangan keuangan kepala daerah dan DPRD
3. Prinsip-prinsip pengelolaan kas
4. Prinsip-prinsip pengelolaan pengeluaran daerah yang telah dianggarkan
5. Tata cara pengadaan barang dan jasa
6. Prosedur melakukan pinjaman daerah
7. Prosedur pertanggungjawaban keuangan
8. Dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah pada pasal 38, menyebutkan sbb :  
“kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas:

1. Laporan perhitunan APBD
2. Nota perhitunan APBD
3. Laporan aliran kas
4. Neraca daerah.”

Pada bagian penjelasan disebutkan sebagai berikut:

“nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah mencakup antara lain:

1. Kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD tahun anggaran yang berkenaan.
2. Kinerja pelayanan yang dicapai
3. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur daerah dan pelayanan public.
4. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD
5. Posisi dana cadangan

Penyusunan neraca daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.”

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan anggaran, pelaporan anggaran, pertanggungjawaban dan pengawasan. Pengetahuan mengenai hal ini berguna untuk memastikan apakah pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan anggaran dan juga tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Effendy (2010, dalam Subagjo, 2013)

#### **D. Review atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)**

Dari sisi internal laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja pemerintah dan unit kerja pemerintah-pemerintah daerah sedangkan dari sisi eksternal laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan.

Menurut Halim (2002 : 23-24) Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Sedangkan Secara khusus tujuan penyajian laporan keuangan oleh pemerintah daerah adalah;

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.

3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang disyaratkan.
4. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, serta untuk memprediksikan pengaruh pemilikan dan pembelanjaan sumber daya ekonomi terhadap pencapaian tujuan operasional.

Aparat Inspektorat wajib melaksanakan review atas LKPD sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 33 PP tersebut, dinyatakan bahwa review atas laporan keuangan oleh aparat Inspektorat adalah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut. Review dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi akan disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah.

Review bisa dilaksanakan secara paralel dengan LKPD. Review paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. LKPD yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) diajukan kepada kepala daerah dan sudah mengakomodasi hasil review Inspektorat. Review atas LKPD inilah yang nantinya ditujukan untuk menginformasikan kepada kepala daerah mengenai

hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerahnya (Subagjo, 2013).

#### **E. Kualitas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah)**

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk kelancaran dalam pemerintahan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keahlian dan kejujuran dalam pembuatan laporan keuangan, agar masyarakat juga sejahtera karena pembangunan untuk masyarakat bisa lancar. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan keuangan kepada DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah dalam menunjukkan ketaatan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan; Neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; Laporan Arus Kas (LAK) yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas

pada tanggal pelaporan; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas (Subagjo, 2013).

Kriteria kualitas laporan keuangan mengarah pada informasi yang dihasilkan akan memberikan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan. Terdapat beberapa kriteria kualitas informasi spesifik-keputusan, diantaranya adalah (Suwardjono : 164177) :

1. Relevan; kemampuan informasi dalam membantu pemakai untuk mencapai tujuannya, untuk dipahami maknanya, dan tepat waktu dalam ketersediaannya untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan atau kebijakan.
2. Andal ; kemampuan informasi untuk memberi keyakinan dan keterujian bahwa informasi tersebut benar atau valid, termasuk ketepatan penyimbolan (kecocokan pengukur dan fenomena yang diukur).
3. Dapat dibandingkan ; kemampuan informasi untuk membantu para pemakai dalam mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomik.
4. Taat asas ; mengikuti standar atau metode yang sama dari periode ke periode berikutnya.
5. Netral ; ketidakberpihakan dan tidak bertindak sesuai keinginan pihak tertentu atau menguntungkan/merugikan pihak tertentu

Menurut Keputusan BPK RI No. 4/K/I-XIII.2/9/2012 tentang jenis Opini, terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang diberlakukan, BPK dapat memberikan opini WTP dengan paragraf penjelas karena keadaan tertentu sehingga mengharuskan pemeriksa menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai modifikasi dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP) memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
3. Tidak Wajar memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP.
4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP) menyatakan bahwa pemeriksa tidak menyatakan opini atas laporan keuangan ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas beberapa hal yaitu :

1. Sistem Pengendalian Intern. Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pengendalian Intern pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), SPI meliputi lima unsur

pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. SPI dinyatakan efektif bila mampu memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kepatuhan Pemberian opini juga didasarkan pada penilaian kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Salah satu hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan berupa laporan kepatuhan. Laporan tersebut mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.
3. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK diselesaikan selambat-lambatnya dua bulan setelah BPK menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Selanjutnya BPK akan melakukan

pemeriksaan laporan keuangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 17 Laporan hasil pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id)).

Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK memberikan opini WTP kepada 312 daerah, opini WDP ke 187 daerah dan opini tidak wajar ke 4 daerah, apabila dibandingkan dengan tahun 2014, LKPD yang mendapat opini WTP meningkat. Pemberian opini atas laporan keuangan oleh BPK didasarkan pada kriteria; pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah; kedua kecukupan pengungkapan, ketiga; kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sementara itu, untuk melaksanakan tugas tersebut, inspektorat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. pelaksanaan pemeriksaan terhadap tugas Pemerintah Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan, ekonomi, keuangan dan asset, serta bidang khusus
2. pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap unit/satuan kerja.
3. Pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Inspektorat–Kabupaten

4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten dan Kota terdiri dari Inspektur, Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban), dan kelompok jabatan fungsional
5. Penyelenggaraan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Aparat Inspektorat adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Fahrezi, 2011). Berdasarkan tugas pokok Aparat Inspektorat tersebut maka tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Sektor Publik, yang mana berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak public.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah berbentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kini diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Penerapan PSAK 1 Revisi 2013 digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum (*general purpose financial statement*). PSAK ini tidak berlaku untuk penyusunan laporan keuangan entitas syariah. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya, dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai Laporan Keuangan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan

pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan, yakni Relevan dan Andal.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan.

Kemudian terkait dengan LKPD yang disusun oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui secara independen bagaimana kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kinerja pengelolaan keuangan pada Pemerintah Daerah maka dilakukan audit oleh pihak eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang pada akhirnya akan memberikan suatu opini atas LKPD berdasarkan bukti-bukti, Laporan Keuangan, dan temuan-temuan yang ada.

## F. Peneliti Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Hasil Peneliti Terdahulu**

Nama peneliti (tahun)	Judul	Metode penelitian	Hasil
Rosmawati (2011)	Pengaruh kompetensi SDM dan peran auditor internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota bandung	Struktural Equation Modeling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor dan peran auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah kota bandung.
Puspita sari (2012)	Pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( studi kasus pada pemerintah daerah se eks karesidenan basuki )	Kualitatifdankuantitati	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangandaerah telah cukup baik di miliki oleh aparat inspektorat dalam pelaksanaan kerja reviunya
Amrullah doni ( 2011)	Pengaruh personal background, pengetahuan tentang pengelolaan	Kualitatif dan kuantitati	Hasil penelitian menunjukkan secara simultan, <i>personal background</i> , pengetahuan tentang pengelolaan

	keuangan daerah dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor inspektorat dan proses pelaksanaan audit internal terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah bai secara simultan maupun parsial		keuangan daerah, dan pengetahuan tentang proses pelaksanaan audit internal berpengaruh terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah, dan secara persial, <i>personal background</i> tidak berpengaruh terhadap peran auditor inspektorat dalam pengawasan keuangan daaerah.
Resky alvino Subagjo (2012)	pengaruh profesionalisme, pegetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat inspektorat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada inspektorat kabupaten dan kota se Eks Karesidenan Gerbang Kertasusila)”	Kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan profesionalisme, pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah dan intensitas pembinaan aparat inspektorat berpengaruh positif signifikan pada variabel yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Alim dkk (2007)	Kualitas audit yang dilakukan	Variabel yang digunakan yaitu	Dari penelitian tersebut diketahui

	oleh kantor audit aparat inspektorat auditor pada akuntan publik se-jawa timur	kompeteni dan independensi sebagai variabel independen	bahwa independensi dan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
Muh. Taufiq effendi (2010)	Pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah ( <i>studi empiris pada pemerintah kota gorontalo</i> )	Kuesioner	Dari penelitian tersebut diketahui pengaruh kompetensi, independensi, dan motivasi aparat inspektorat kota gorontalo terhadap kualitas audit.
Agustiany Nteseo (2012)	Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit	Data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner	Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa profesionalisme auditor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit
Rosmiala (2015)	Pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Kualitatif dan kuantitatif	Hal ini berarti profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat memberikan kontribusi sebesar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
Ahmad (2011)	Pengaruh kompetensi dan independensi pemeriksa terhadap	Kompetensi dan independensi	Hasil dari penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi dan independensi

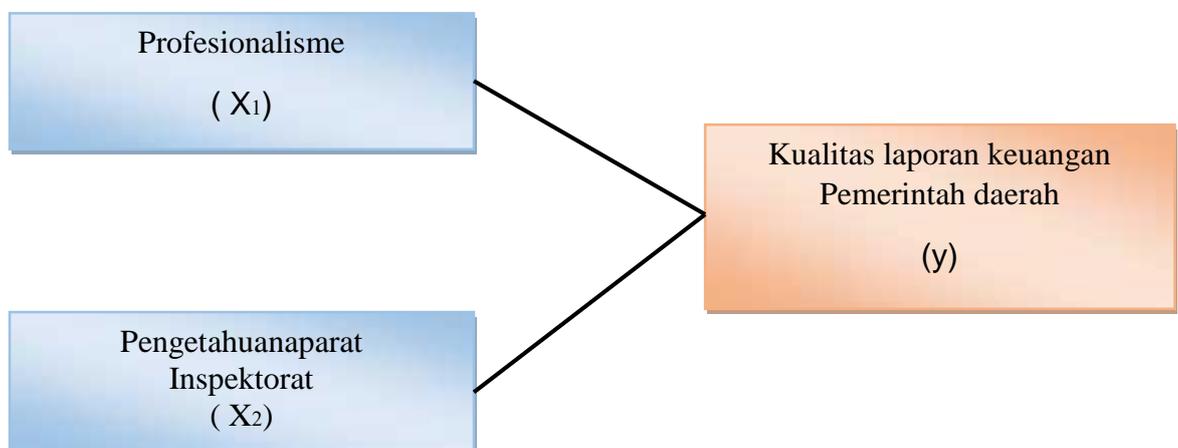
	<p>kualitas hasil pemeriksaan dalam pengawasan keuangan daerah (<i>studi kasus pada inspektorat kabupaten pasaman</i>)</p>		<p>secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat inpektorat kabupaten pasaman.</p>
<p>Mabruri dan winarna (2010)</p>	<p>Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah</p>	<p>Purposive sampling</p>	<p>Hasil dari penelitian bahwa independensi tidak berpengaruh secara signifikan, sedangkan untuk objektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit di lingkungan pemerintah daerah.</p>

### G. Kerangka pikir

Kerangka pikir menyatakan bahwa suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah di ketahui dalam suatu masalah tertentu. Kerangka pikir akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat, begitu juga jika ada variabel yang menyertainya, maka peran variabel tersebut harus dijelaskan, kerangka pikir perlu di kemukakan apabila penelitian menghubungkan dua penelitian atau lebih

Berikut kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Gambar I. Kerangka Pikir**



## **H. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka hipotesis yang dapat diamati adalah diduga bahwa profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Inspektorat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Tumanurung Nomor 15 Sungguminasa, Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yaitu terhitung mulai bulan maret sampai dengan april 2017

#### **B. Populasi dan Sempel**

##### **1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik, jumlah kuesioner yang dibagikan kepada responden adalah sebanyak jumlah populasi yaitu 30 kuesioner, seluruh aparat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Gowa yang memiliki fungsional Auditor dan Jabatan Pelaksana yang melakukan tugas pengawasan.

##### **2. Sampel**

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 responden meliputi Inspektur, Sekretaris, Irbanwil I sampai Irbanwil IV, Kasubag Evaluasi Dan Pelaporan, Kasbug Adm Dan Umum, Kasbug Perencanaan, Fungsional Auditor, dan Jabatan Pelaksana. Penggunaan sampel penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain : pertama, pegawai negeri sipil inspektorat gowa yang bekerja sebagai pegawai tetap lebih dari satu tahun. Kedua,

pegawai yang bekerja di bidang fungsional auditor.ketiga, pegawai dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan jabatan pelaksana.

### **C. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **1. Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a) Data Kualitatif adalah data yang di peroleh berupa keterangan keterangan secara lisan ataupun tertulis, antara lain mengenai sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi beserta uraian tugasnya, dan data-data lainnya relevan dengan objek penulisan.
- b) Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dari keterangan keterangan secara tertulis biasanya dalam bentuk angka-angka seperti anggaran per bagian, biaya yang terjadi dalam satu periode akuntansi serta data-data lain yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

#### **2. Sumber data**

Sumber data berasal dari :

- a) Data *Primer*, yaitu data-data yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti, yaitu diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari Aparat Inspektorat Kab. Gowa yang melakukan tugas pengawasan sebagai responden dalam penelitian ini.
- b) Data *Sekunder*, adalah sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder yang dimaksud yaitu seperti struktur organisasi, tugas

dan fungsi pokok aparat inspektorat dan Perda yang berlaku pada Inspektorat.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan data-data melalui penggabungan data yang akan ditulis berdasarkan metode *field research* (penelitian lapangan) untuk memperoleh data primer dimana penulis dapat memperoleh data-data melalui penelitian secara langsung di tempat lokasi penelitian nanti dan *library research* (penelitian kepustakaan) untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku ilmiah, ketentuan-ketentuan internasional, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber informasi yang dengan menggunakan cara :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian pustaka yaitu dengan mempelajari literatur-literatur baik berupa buku-buku atau sumber bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan penelitian yang dilakukan secara langsung berupa - wawancara atau kuisioner dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan materi yang terkait dengan penelitian ini.

- a) Metode Observasi adalah melakukan pengumpulan data dengan melakukan peninjauan langsung pada Inspektorat Kab. Gowa
- b) Metode Dokumentasi adalah digunakan untuk memperoleh data mengenai dokumen yang akan digunakan dalam penelitian
- c) Metode kuisisioner adalah suatu daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam hal ini Aparat Inspektorat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada Responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan tersebut.

#### **E. Operasional Variabel penelitian**

Dalam penelitian pengaruh profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat, variabel dependen (Y) yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan variabel independennya terdiri dari Profesionalisme (X1) dan Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2). Definisi operasional dan pengukuran untuk variabel-variabel tersebut adalah :

##### **1. Variabel Dependen**

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria kualitas laporan keuangan daerah (LKPD) dalam SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dimana kriteria tersebut tersaji pada 5 pertanyaan sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu metode yang

mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

## 2. Variabel Independen

- a. Profesionalisme (X1) yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu Kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing ( 2005: 73). Variabel ini akan tersaji pada 5 pertanyaan kuisisioner sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.
- b. Pengetahuan aparat inspektorat (X2) yang dimaksudkan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Dalam negeri Nomor 44 tahun 2008 tentang “ Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2009 “ Dimana kesemuanya itu tersaji dalam 5 pertanyaan kuisisioner sebagai indikator. Pengukuran variabelnya menggunakan skala lima angka (Skala Likert) yaitu merupakan metode yang mengukur sikap dan menyatakan setuju atau ketidaksetujuan terhadap subjek, objek, atau kejadian tertentu.

Tabel 3.1

## Variabel Dan Indikator

## Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat inspektorat

NO	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1	Kualitas laporan Keuangan Pemerintah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya</li> <li>2. Melaporkan hasil operasi</li> <li>3. Melaporkan kondisi keuangan.</li> <li>4. Melaporkan sumber daya jangka panjang.</li> </ol>	Skala likert
2	Profesionalisme (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi menyelesaikan pekerjaan</li> <li>2. Bertanggung jawab dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan pekerjaan</li> <li>3. Kemampuan untuk memfokuskan pada fakta-fakta yang relevan.</li> </ol>	Skala likert
3	Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2)	Pengetahuan tentang Akuntansi dan auditing serta pengetahuan lainnya.	Skala likert

Variabel- variabel tersebut diukur oleh instrumen pengukur daam bentuk kuesioner berskala menggunakan tipe skala likert 5 point, skala likert ini berisi 5 ( lima) tingkat jawaban mulai dari 1 ( sangat tidak setuju), 2 ( tidak setuju), 3 ( kurang seetuju), 4(setuju), dan 5 ( sangat setuju)

**Table 3.2**  
**Instrument Pengukuran Variabel**

<b>Jawaban</b>	<b>Skor</b>
Sangat tidak setuju	1
Tidak setuju	2
Kurang setuju	3
Setuju	4
Sangat setuju	5

#### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk mengetahui kuesioner berkualitas dilakukan uji validitas dan reabilitas. Pengujian tersebut bertujuan untuk mengetahui konsisten dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen

##### 1. Uji Kualitas Data

###### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesionerdan apakah kuisioner tersebut benar-benar cocok untuk digunakan pada penelitian ini. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang

akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). Instrumen dikatakan valid bila mempunyai nilai koefisien korelasi  $r_{hitung} > r_{kritis}$ , dimana  $r_{kritis} = 0.3$ .

b. Uji Reliabilitas

Uji realibilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2011:47). Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha*  $> 0,6$ .

c. uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Dalam melakukan penelitian ini peneliti hanya menggunakan 3 alat uji, sebab data yang peneliti gunakan merupakan data primer dalam bentuk kuisioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang

waktu. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

d. Uji Normalitas

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah model regresi antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini dapat dilihat dengan menggunakan normal probability plot. Data dalam keadaan normal apabila distribusi data menyebar di sekitar garis diagonal (Ghozali, 2011:160). Terpenuhi syarat normalitas akan menjamin dapat dipertanggungjawabkannya model analisis yang digunakan, sehingga kesimpulan yang diambil juga dapat dipertanggungjawabkan

e. Uji Multikolinieritas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas multikolinieritas) (Ghozali, 2011:105). Mengukur multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance atau VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel. Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Dapat dilihat juga dari korelasi pearson antar variabel independen, dimana dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilainya di bawah 0,8 (Wijayanto, 2008).

f. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dari gambar Scatterplot, apabila ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Regresi yang baik bebas dari heteroskedastisitas (Ghozali 2011:139)

g. Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda, dimana analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali 2011:99).

Rumus regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :  $X_1$  = Profesionalisme

$X_2$  = Pengetahuan Aparat Inspektorat

$Y$  = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

= Nilai konstanta

$b$  = Koefisien Variabel

$e$  = Error

## 2. Uji F

Uji F (ANOVA) digunakan untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual yang diukur dari Goodness of Fit suatu model (Ghozali 2011:97). Pengukuran hipotesis dapat dilakukan dengan cara berikut:

- 1)  $H_0: \beta = 0$ , maka tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 2)  $H_1: \beta \neq 0$ , maka ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.
- 3) Level of significant ( $\alpha$ ) sebesar 5%
- 4) Ketentuan yang digunakan adalah (berdasarkan probabilitas):  
 Jika probabilitas  $> 0,05$ , maka  $H_0$  tidak berhasil ditolak  
 Jika probabilitas  $< 0,05$ , maka  $H_0$  berhasil ditolak.

## 3. Uji t

Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh yang signifikan masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (5%), dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen. Sedangkan jika terjadi sebaliknya, yaitu nilai signifikansi  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali 2011:97). Pengujian hipotesis dapat menggunakan perbandingan antara  $t$  hitung dan  $t$  tabel dengan kriteria pengambilan keputusan :

- a. Apabila  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independennya secara parsial mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya.
- b. Apabila  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Kondisi ini menunjukkan bahwa variabel independennya secara parsial tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel dependennya

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat Kantor Inspektorat Kabupaten Gowa**

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terletak di Jalan Tumanurung Nomor 15 Sungguminasa, Kabupaten Gowa. Kantor Inspektorat Daerah berdiri sejak Tahun 1979 namun terkendala oleh belum adanya pegawai sehingga baru beroperasi pada Tahun 1980.

#### **B. Visi dan Misi**

##### **1. Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh suatu unit kerja/instansi. Visi Inspektorat Kabupaten Gowa adalah sesuatu yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan yakni : “Terwujudnya pengawasan yang handal dalam peningkatan pelayanan prima aparatur pemerintahan Kabupaten Gowa”.

##### **2. Misi**

Untuk mencapai misi tersebut, Inspektorat Kabupaten Gowa memiliki misi. Misi yaitu sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar Inspektorat Kabupaten Gowa dapat berjalan lancar dan terlaksana dengan baik. Misi tersebut adalah :

- a. Mendorong peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja

pemerintah yang handal.

- a. Mendorong terciptanya Aparatur Pemerintah Kabupaten Gowa yang bersih, transparan dan akuntabel serta menghargai partisipasi masyarakat.
- b. Meningkatkan citra dan wibawa lembaga seta aparatur pengawasan dengan melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- c. Meningkatkan profesionalisme Aparat pengawasan dan sasaran pengawasan dalam memegang penyelenggaraan pemerintah di bidang pengawasan.
- d. Meningkatkan koordinasi dengan instansi dalam bidang pengawasan.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan fundamen dari suatu lembaga/organisasi, agar system yang diterapkan untuk mengelola suatu kegiatan lembaga/organisasi dapat berjalan dengan baik, maka struktur organisasi tersebut mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu system. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa Nomor 6 Tahun 2013, bahwa susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa adalah :

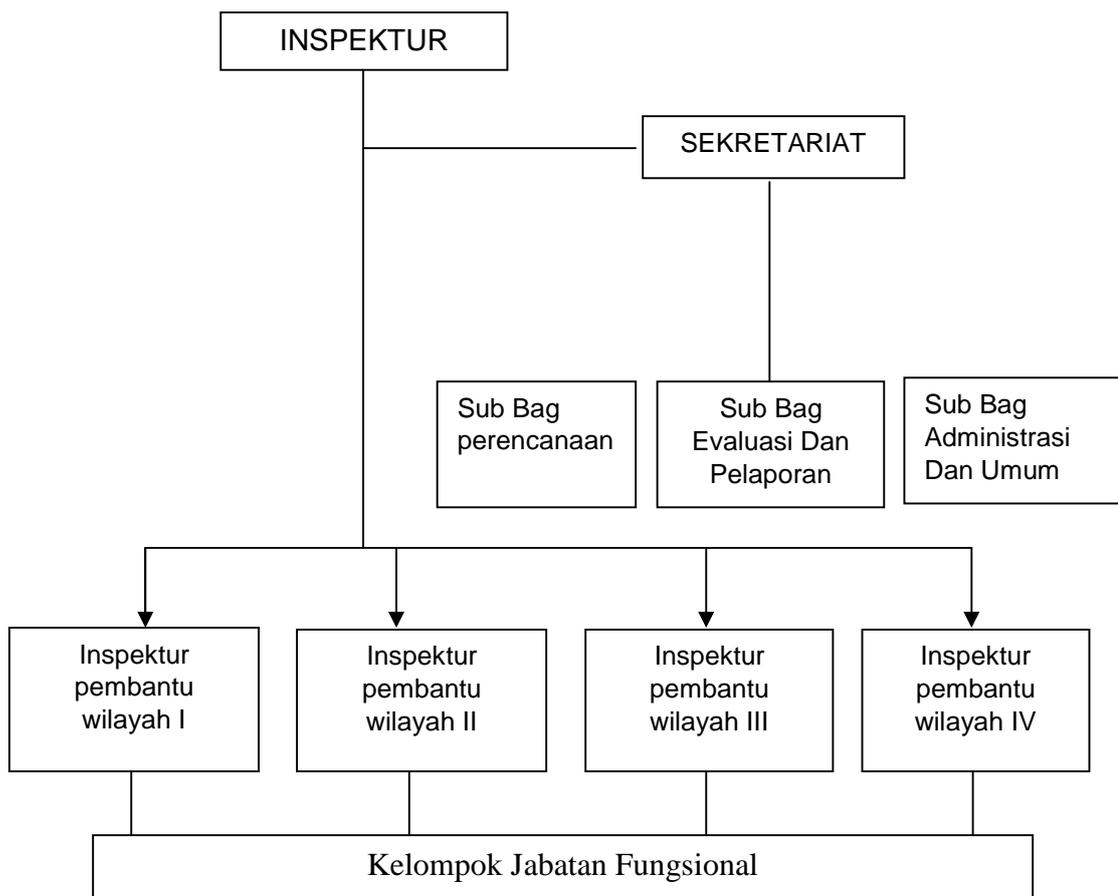
1. Inspektur
2. Secretariat :
  - a. Sub Bagian Perencanaan
  - b. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan
  - c. Sub Bagian Administrasi Dan Umum

3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnya, secara teknis struktur organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

### Gambar 2. Struktur organisasi

Gambaran struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gowa



*Sumber : data diolah dari hasil penelitian, 2017*

#### **D. Tugas dan Fungsi**

Meninjau data sekunder yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Gowa, diketahui bahwa aparat Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Gowa.

##### **1. Inspektur**

Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa, serta pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 30 Tahun 2012, Inspektur Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, adapun tugas Inspektur sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang pengawasan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan aparatur Negara/daerah, serta kesekretariatan Inspektorat.
- b. Merumuskan kebijakan dan fasilitas pengawasan
- c. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, penilaian, monitoring dan pelaporan tugas pengawasan
- d. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pengawasan serta memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan serta pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Melekat (WASKAT).
- g. Membina dan mengarahkan sekretaris dan para Inspektur Pembantu

Wilayah dalam melaksanakan tugasnya.

- h. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Inspektorat.
- i. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan Inspektorat.
- j. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Inspektorat.
- k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- l. Menilai prestasi kerja Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2. Sekretariat

Secretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Inspektorat Kabupaten.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.

- b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
- c. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan.
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan asset, perencanaan dan pelaporan, surat menyurat dan rumah tangga
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun rincian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Inspektorat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup Inspektorat Kabupaten
- d. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian
- e. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan

- f. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan
- g. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan penerapan pengawsan Melekat (WASKAT) dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Inspektorat Kabupaten.
- j. Menilai prestasi kerja para Sub Bagian dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- k. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun bagian-bagian dari sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa terdiri dari :

a. Sub Bagian perencanaan

Sub Bagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan Inspektorat meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, protocol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan, kepegawaian dan tugas umum lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Kepala Sub Bagian perencanaan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan
- 3) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 4) Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- 2) Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan surat menyurat
- 3) Mengelola dan melaksanakan urusan kearsipan
- 4) Mengelola dan melaksanakan urusan keprotokoleraan dan perjalanan dinas
- 5) Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan
- 6) Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan

- 7) Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian
- 8) Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya
- 9) Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan penerapan Pengawasan Melekat (WASKAT) dalam pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
- 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 11) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan melaksanakan administrasi perencanaan dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, kepala Sub Bagian evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- 2) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan jadwal kegiatan operasional tahunan Inspektorat Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan
- 3) Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan
- 4) Mengkordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup Inspektorat Kabupaten
- 6) Menginventarisir hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- 8) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- 9) Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA, LAKIP, RENSTRA, dan RENJA serta dokumen perencanaan lainnya
- 10) Menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Sub Bagian Administrasi Dan Umum

Sub Bagian Administrasi Dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Sub Bagian Keuangan
- 2) Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- 3) Penyusunan rencana kegiatan, kebutuhan dan anggaran Inspektorat
- 4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, sebagaimana berikut :

- 1) Mempersiapkan bahan-bahandan menyusun rencana kebutuhan anggaran dilingkungan Inspektorat Kabupaten sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Membuat rencana operasional program kerja sub bagian
- 3) Membuat daftar usulan kegiatan
- 4) Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian
- 5) Menyiapkan proses administrasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 6) Melaksanakan perbendaharaan keuangan
- 7) Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode tahunan dan lima tahunan
- 8) Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran
- 9) Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan
- 10) Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan
- 11) Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### 3. Inspektur Pembantu Wilayah I

Inspektur pembantu wilayah I dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, Mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah 1
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah 1
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah 1
- d. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah I
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan dibidang pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I
- d. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I

- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintah dan masyarakat pada wilayah I
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintah dan masyarakat pada wilayah I
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan masyarakat pada wilayah I
  - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan masyarakat pada wilayah I
  - i. Melaksanakan dan/atau mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut
  - j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah I
  - k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
4. Inspektur Pembantu Wilayah II

Inspektur Pembantu Wilayah II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan

Pemerintah Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah II
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah II
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah II
- d. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah II
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II
- d. Membrikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II

- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada wilayah II
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II.
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II
  - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah II
  - i. Melaksanakan atau/dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemuktahiran data tindak lanjut
  - j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah II
  - k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada wilayah III.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah III
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah III
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah III
- d. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah III
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III

- d. Membrikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III
  - e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada wilayah III
  - f. Melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III
  - g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III
  - h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah III
  - i. Melaksanakan atau/dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemuktahiran data tindak lanjut.
  - j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah III
  - k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Inspektur Pembantu Wilayah IV dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu, mempunyai tugas pokok membina, mengkoordinasikan dan

melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan kasus-kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada wilayah III.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan program pengawasan pada wilayah IV
- b. Perumusan, pengkoordinasian kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pada wilayah IV
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan pada wilayah IV
- d. Penginventarisasian hasil temuan aparat pengawasan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, adapun rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pada ayat 1 dalam Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan pada wilayah IV
- b. Mengkoordinir penyusunan rencana kegiatan tahunan di bidang pengawasan an pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- c. Mengkoordinir pengumpulan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV
- d. Membrikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV
- e. Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan pada wilayah IV
- f. Melakukan pemantaun dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penanganan pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada wilayah IV
- i. Melaksanakan atau/dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi pengawasan, gelar pengawasan dan pemuktahiran data tindak lanjut.
- j. Melaporkan hasil pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah IV
- k. Menilai prestasi kerja para Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier.
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Responden

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarkan melalui *contact person* kepada Aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa pada tanggal 03, April 2017. Sampai dengan batas akhir pengambilan yakni tanggal 15 Mei 2017, dari 32 kuesioner yang disebarkan, 30 kuesioner yang kembali dan 2 kuesioner yang tidak kembali.

**Tabel 5.1**  
**Demografi Responden**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah (orang)</b>	<b>Persentase</b>
Jenis kelamin		
1. Laki- laki	17	56,6
2. Perempuan	13	43,4
Usia		
3. < 30 tahun	11	36,6
4. 30-40 tahun	13	43,4
5. 40-50 tahun	6	20
Tingkat pendidikan		
1. S2	8	26.7
2. S1	22	73.3
Golongan		
1. 2c	3	10
2. 3a	1	3.4
3. 3b	13	43.3
4. 3c	4	13.3
5. 3d	3	10
6. 4a	3	10
7. 4b	2	6.7
8. 4c	1	3.3

*Sumber : data primer diolah, 2017*

Data demografi responden dalam tabel 5.1 di atas menyajikan beberapa informasi umum mengenai kondisi responden yang di temukan di lapangan. Tabel 5.1 berisi informasi yang di sajikan antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan golongan. Berdasarkan tabel tersebut :

1. Jenis kelamin

diketahui bahwa responden (aparatur) perempuan lebih sedikit yaitu 43.4 % di bandingkan responden laki-laki 56.6 %,

2. Usia

responden dikelompokkan berdasarkan usia dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30-40 tahun yaitu sebanyak 43.4 % kemudian mereka yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 36.6 %, sedangkan yang berusia 40-50 tahun sebanyak 20 %,

3. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 73.3%. kemudian yang berpendidikan S1 26.7 %.

4. Golongan

Selanjutnya responden di kelompokkan berdasarkan golongan dimana golongan IIC sebanyak 10 %, golongan III/a sebanyak 3.4 %, golongan III/b sebanyak 43.3 %, golongan III/c sebanyak 13.3 %, golongan III/d sebanyak 10 %, golongan IV/a sebanyak 10 %, golongan IV/b sebanyak 6.7 %, dan golongan IV/c sebanyak 3.3 %.

## B. Hasil Pengujian Analisis

### 1. Uji Validitas dan Realibilitas

#### a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan *Spearman correlation* dan perhitungan menggunakan *SPSS 20 for windows*. Syarat minimum yang digunakan untuk dianggap memenuhi syarat adalah  $r_{hitung} > r_{kritis}$  dimana  $r_{kritis} = 0.3$ . Suatu pernyataan dikatakan valid jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa saja yang hendak diukur. Untuk hasil perhitungan *Spearman correlation (output-nya)* sebagaimana terlampir.

Dalam penelitian ini, terdapat 15 item pernyataan, dimana seluruh item pernyataan dikatakan valid karena telah memenuhi syarat  $r_{hitung} > r_{kritis}$  dimana  $r_{kritis} = 0.3$ . Rincian pengujian validitas dapat dilihat pada table sebagai berikut :

**Tabel 5.2**

#### HASIL UJI VALIDITAS INSTRUMEN

No item	Koefisien Korelasi Butir Total			keterangan
	Profesionalisme	Pengetahuan aparat inspektorat	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	
1	0,456	0,231	0,347	Valid
2	0,508	0,489	0,559	Valid
3	0,508	0,333	0,551	Valid
4	0,654	0,593	0,340	Valid
5	0,153	0,419	0,268	Valid

Sumber : data diolah dari hasil peneliian, 2017

Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah untuk menguji kualitas data berupa uji validitas dan reabilitas. Dari hasil uji validitas yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *SPSS* Versi 20 menunjukkan bahwa koefisien korelasi pearson moment untuk setiap butir pernyataan dengan skor total variabel profesionalisme (X1), Pengetahuan Aparat Inspektorat (X2), dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( Y )

**b. Uji Reliabilitas**

Uji realibilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala atau kejadian. Realibilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. (Ghozali, 2011:47). Uji ini dilakukan dengan menghitung nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel. Suatu alat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* > 0,60. Hasil uji reabilitas secara rinci di tampilkan dalam tabel 5.3 sebagai berikut :

**Tabel 5.3**  
**Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's alpha based on standardized items	N of items
Profesionalisme (X <sub>1</sub> )	0,843	0,60
Pengetahuan aparat inspektorat( X <sub>2</sub> )	0,874	0,60
Kualitas laoran keuangan pemerintah daerah(Y)	0,861	0,60

*Sumber : data diolah dari hasil penelitian, 2017*

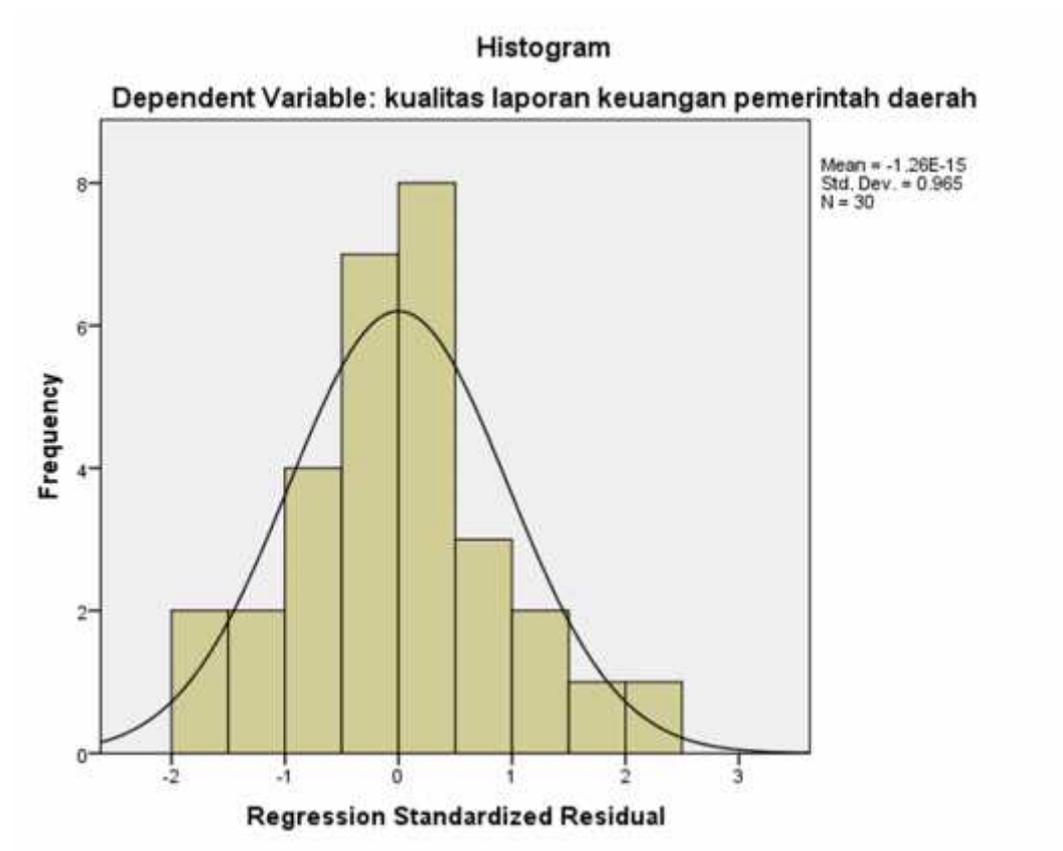
Berdasarkan data pada tabel 5.7 tersebut diatas menunjukkan bahwa angka-angka dari nilai *alpha cronbach's* pada variabel independen dan dependen dalam penelitian ini, semuanya menunjukkan besaran diatas nilai 0,60. Hal ini berarti bahwa seluruh pernyataan untuk variabel independen dan dependen adalah reliabel dan dapat disimpulkan bahwa instrument pernyataan koesioner menunjukkan kehandalan dalam mengukur variabel-variabel dalam model penelitian.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependent dan independent keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak..Cara mendeteksi normalitas dilakukandengan melihat grafik *histogram*.

Gambar 3

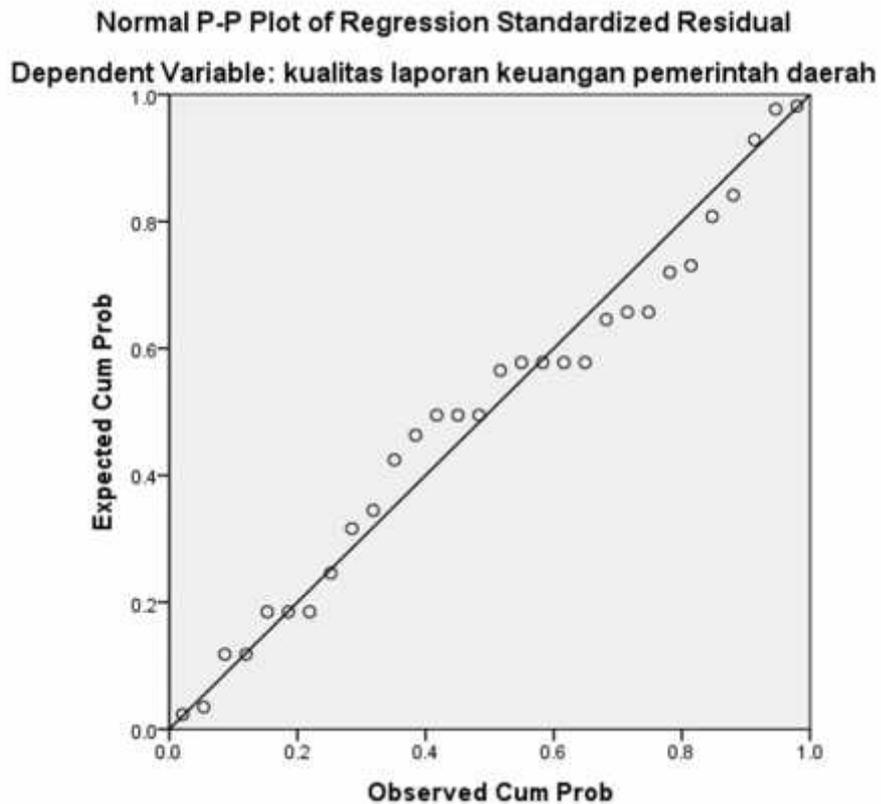


*Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017*

Berdasarkan grafik histogram diatas, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal, grafik histogram menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Untuk lebih memperjelas tentang data dalam penelitian ini maka disajikan grafik histogram dan grafik normal P-plot.

Gambar 4



*Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017*

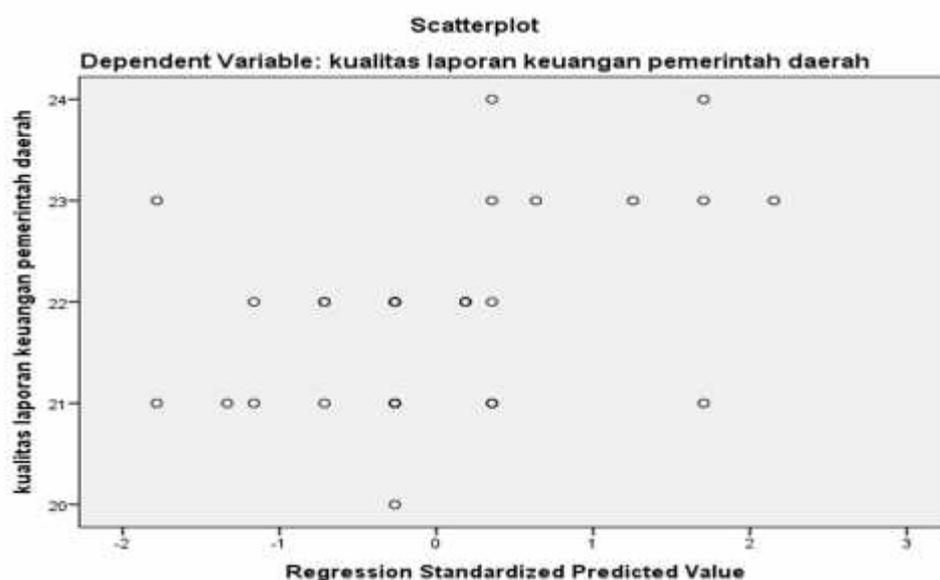
Sedangkan grafik *normal probability plot*, dapat dilihat bahwa titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar Scatterplot, apabila ada pola-pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya, apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Regresi yang baik bebas dari heterokedastisitas (Ghozali 2011:139).

Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 5**



Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi

### c. uji Multikoloneritas

Uji multikoloneritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (bebas multiko linieritas) (Ghozali, 2011:105). Mengukur multikolinieritas dilihat dari nilai tolerance atau VIF (variance inflation factor) dari masing-masing variabel. Hasil uji multikoloneritas dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

TABEL 5.4

#### HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Profesionalisme	0.954	1.030
1 pengetahuan aparat inspektorat	0.958	1.043

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

*Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017*

Berdasarkan tabel 5.4 Dimana nilai VIF tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1. Dapat dilihat juga dari korelasi pearson

antar variabel independen, dimana dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilainya di bawah 0,8 (Wijayanto, 2008).

### 3. Pengujian Hipotesis

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen profesionalisme (X1), pengetahuan aparat inpektorat (X2), dan variabel dependen kualitas laporan keuangan emerintah daerah ( Y).

Berikut ini adalah uraian hasil pengujian regresi berganda dan output tabel pengujian dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 20, dalam bentuk output *model summary*, ANOVA (uji F), serta *coefficient* ( uji t ), seperti pada tabel sebagai berikut :

#### a. Uji parsial ( test- t)

Hasil uji Profesionalisme (X1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) .uji t dapat di lihat pada tabel 5.7 yaitu pada nilai t dengan nilai pembilang/df1 (k) = 2 ( jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 (n-k-1) = 27 maka  $t_{tabel}$  diperoleh yaitu 1.703. pada tabel 5.7 profesionalisme  $t = 1.370$ , nilai  $T_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $1.370 < 1.703$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima yang berarti

profesionalisme tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan nilai signifikan  $0.182 > 0.05$

Hasil uji pengetahuan aparat inspektorat (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) uji t dapat dilihat pada tabel 5.7 yaitu pada nilai t dengan nilai pembilang/df1 ( $k = 2$  (jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 ( $n - k - 1 = 27$  maka  $t_{tabel}$  diperoleh yaitu 1.703. pada tabel 5.7 pengetahuan aparat inspektorat  $t = 2.331$  nilai  $T_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,331 > 1.703$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dikarenakan nilai signifikan  $0.027 < 0.05$

TABEL 5.5

## HASIL UJI PARSIAL (UJI t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	4.684	6.909	.678	.504
1	Profesionalisme	.191	.140	.243	.182
	pengetahuan				
	aparat inspektorat gowa	.646	.277	.413	2.331

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Berdasarkan tabel 5.7 dapat di simpulkan model regresi yang dapat di bentuk yaitu :

$$\text{Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah} = 4.684 + 0.191X_1 + 0.646X_2 + e$$

Dari hasil regresi tersebut dapat di simpulkan bahwa :

1. Konstanta sebesar 4.684 artinya jika profesionalisme ( $X_1$ ), pengetahuan aparat inspektorat ( $X_2$ ) nilainya 646, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ ) nilainya adalah 4.684. hal ini berarti jika tidak ada perubahan profesionalisme maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 4.684
2. Koefesien regresi profesionalisme ( $X_1$ ) sebesar 0.191 artinya pada variabel profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ )
3. Koefesien regresi untuk variabel pengetahuan aparat inspektorat ( $X_2$ ) sebesar 0.646. dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa varabel pengetahuan aparat inspektorat ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ( $Y$ )

**b. Uji Simultan ( Test-F)**

TABEL 5.6

HASIL UJI SIMULTAN( UJI F)

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.251	2	2.626	3.135	.060 <sup>b</sup>
	Residual	22.615	27	.838		
	Total	27.867	29			

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. Predictors: (Constant), pengetahuan aparat inspektorat gowa, profesionalisme

Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017

Dari hasil pengujian terhadap uji simultan ANOVA atau F test seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini diperoleh nilai Fhitung sebesar 3.135 dengan probabilitas 0.060. karena probabilitas jauh lebih besar dari nilai signifikan 0.05, maka model regresi dapat di gunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan dapat dikatakan bahwa profesionalisme, dan pengetahuan aparat inspektorat tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**c. Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 5.7

HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.434 <sup>a</sup>	.188	.128	.915	2.822

- a. Predictors: (Constant), pengetahuan aparat inspektorat gowa, profesionalisme
- b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

*Sumber : Data diolah dari hasil penelitian, 2017*

Berdasarkan tampilan output *model summary* pada tabel, besarnya *adjusted R*( Koefisien determinasi yang telah disesuaikan ) adalah 0,128. Nilai ini menunjukkan bahwa 12.8% variasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu profesionalisme, dan pengetahuan aparat inspektorat, sedangkan sisanya 87.2 % dijelaskan sebab lain di luar model, dengan demikian 12.8% cukup baik digunakan dalam penelitian ini.

#### **d. Pembahasan hasil penelitian**

##### **1) Pengaruh profesionalisme terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah**

Berdasarkan hasil uji t, profesionalisme mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0.05 yaitu 0.182. artinya, variabel ini kurang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan sekaligus mengartikan  $H_a$  di tolak dan  $H_o$  di terima . Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme aparat inspektorat maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang di reviu. Hasil jawaban responden pada kuesioner menunjukkan bahwa profesionalisme memiliki peran yang cukup baik dalam pelaksanaan tugas reviu dan pembinaan aparat inspektorat itu sendiri terhadap setiap SKPD

yang berdampak langsung pada hasil laporan kualitas LKPD kabupaten gowa.

Melihat kembali dari hasil jawaban responden diketahui bahwa profesionalisme yang dapat dicerminkan dalam banyak hal, seperti menyelesaikan pekerjaan, bertanggung jawab pada pekerjaan, dan kemampuan untuk memfokuskan pada fakta-fakta yang relevan, maka dari itu setiap profesionalisme harus menggunakan keahliannya dengan cermat, seksama dan juga hati-hati. Puspitasari (2012) menyatakan bahwa setiap aparat inspektorat di harapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap profesionalismenya agar selanjutnya dapat maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga hasil dari pengaplikasian tugasnya pun menjadi maksimal. Semakin baik aparat inspektorat memperoleh temuan-temuan penyimpangan dalam laporan keuangan, kualitas kerja reviden aparat inspektorat juga akan semakin baik, hal ini tentu saja akan berdampak pada semakin besarnya kesempatan untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan kemudian mendapatkan opini yang baik atas audit yang selanjutnya dilakukan oleh BPK terhadap LKPD di setiap kabupaten. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rosmiala (2015) dan Puspita Sari (2012) yang menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

## **2) Pengaruh Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Nilai t hitung pada variabel pengetahuan aparat inspektorat sebesar 2,331 dan lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.703. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten gowa.

Berdasarkan pada hasil jawaban responden dapat diketahui bahwa pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah sudah cukup dipahami dengan baik oleh aparat inspektorat. Tetapi masih perlu terus dilakukan peningkatan kompetensi maupun pengetahuan agar aparat inspektorat dapat cepat dan tanggap dalam menemukan penyimpangan dan temuan-temuan dalam proses audit disetiap SKPD melalui penelusuran perencanaan anggaran sampai dengan realisasi anggaran pada setiap instansi pemerintahan, aparat inspektorat dapat mengetahui dengan cepat apa yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan yang seperti itu.

Hasil ini sejalan dengan penelitian rezky alvino subagyo (2012) dan Puspitasari (2012 ) yang menyatakan bahwa pengetahuan aparat inspektorat tentang pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten gowa.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, serta akan diuraikan beberapa keterbatasan penelitian dan saran-saran yang bermanfaat yang akan di gunakan pada peneliti selanjutnya.

#### A. Kesimpulan

1. Hasil uji Profesionalisme (X1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) .uji t dapat di lihat pada tabel 5.7 yaitu pada nilai t dengan nilai pembilang/df1 ( $k = 2$  ( jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 ( $n-k-1 = 27$  maka  $t_{tabel}$  diperoleh yaitu 1.703. pada tabel 5.7 profesionalisme  $t = 1.370$ , nilai  $T_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $1.370 < 1.703$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_0$  diterima yang berarti profesionalisme tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan nilai signifikan  $0.182 > 0.05$
2. Hasil uji pengetahuan aparat inspektorat (X2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah(Y)uji t dapat di lihat pada tabel 5.7 yaitu pada nilai t dengan nilai pembilang/df1 ( $k = 2$  ( jumlah variabel independen) dan derajat kebebasan penyebut/df2 ( $n-k-1 = 27$  maka  $t_{tabel}$  diperoleh yaitu 1.703. pada tabel 5.7 pengetahuan aparat inspektorat  $t = 2.331$  nilai  $T_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $2,331 > 1.703$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang berarti pengetahuan aparat inspektorat berpengaruh terhadap kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan dikarenakan nilai signifikan  $0.027 < 0.05$

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat dalam penelitian ini maka peneliti mengajukan saran agar perusahaan tetap mempertahankan dan lebih meningkatkan profesionalisme dan pengetahuan aparat inspektorat. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak agar hasil penelitian dapat digeneralisasi, misalnya untuk seluruh aparat inspektorat se Sulawesi selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alvino, Rizki Subagjo, 2013. *Pengaruh Profesionalisme, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Daerah dan Entitas Pembinaan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*, Skripsi : Universitas Jember
- Ahmad, 2011. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Pemeriksa Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*, Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Pasaman
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi sector publik : Suatu Pengantar*, Erlangga, Yogyakarta.
- Doni, Amrullah, 2011. *Pengaruh Personal Background, Pengetahuan Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dan Proses Pelaksanaan Audit Internal Terhadap Peran Auditor Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Baik Secara Sumiltan Maupun Parsial*, skripsi :
- Dkk, Alim, 2007. *Kualitas Audit Yang Dilakukan Oleh Kantor Audit Aparat Inspektorat Auditor Pada Akuntan Public Sejava Timur*
- Halim, Abdul, 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Halim, Abdul, dan Kyusufi, Muhammad Syam, 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Salemba 4, Jakarta  
<http://www.pengertianpengaruhkamusbesarbahasaindonesia.com>,29/10/2015,jam 15:43
- Mirwana, 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Audit Di Lingkungan Pemerintah Daerah*.
- Nteseo, Agustiany, 2012. *Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kualitas audit*.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah.

Rosmawati, 2011. *Pengaruh Kompetensi SDM Dan Peran Auditor Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung*

Rosmiala, 2015. *Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa*. Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Tri Darma Nusantara

Sari, Puspita, 2012. *Pengaruh Profesionalisme Dan Pengetahuan Aparat Inspektorat Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah se eks Karesidenan Basuki.

Siregar, Syofian, 2010. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta

Suwarjono, 2014. *Teori Akuntansi : Perekayasaan Laporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta

Syah, Sultan, 2015. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Bahan Ajar ; Metodologi Penelitian*, STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar

Taufiq Effendi, Muh, 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat Dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Gorontalo

**Lampiran 1 . Kuesioner penelitian**

Makassar, 03 April 2017

Kepada Yth:

Bapak/Ibu responden

Di-

Tempat

Dengan hormat, Saya mahasiswa program S1 Jurusan Akuntansi di Universitas muhammadiyah Makassar sedang melakukan penelitian untuk penyusunan Skripsi dengan judul: “Pengaruh Profesionalisme dan pengetahuan Aparat Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Kantor Inspektorat kabupaten Gowa”. Sehubungan dengan hal tersebut saya memohon kesediaan Bapak/Ibu agar sudi kiranya meluangkan waktu sejenak untuk mengisi kuesioner yang saya lampirkan pada surat ini.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah profesionalisme dan pengetahuan Aparat Inspektorat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan sesuai dengan etika penelitian, maka data yang saya peroleh akan dijaga kerahasiaannya dan akan digunakan semata-mata hanya untuk penelitian ini.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu atas bantuan dan kerjasamanya.

Hormat saya

Peneliti

sartika



	yang lebih baik ketika menyelesaikan pekerjaan.					
4	Seorang aparat harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengambil tindakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.					
5	Seorang yang memiliki fungsional auditor harus memiliki fakta-fakta yang relevan dalam mengungkapkan suatu hal					
<b>b. Variabel Pengetahuan Aparat (X2)</b>						
1	Pengalaman merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam memprediksi dan deteksi auditor					
2	Keterampilan, komunikasi, pengetahuan umum, pengetahuan organisasional, pengetahuan akuntansi dan auditing merupakan atribut yang diperlukan oleh seorang auditor.					
3	Kegagalan auditor dalam menemukan kecurangan/kesalahan karena kurangnya pengetahuan					
4	Akuntansi merupakan proses mencatat, menggolongkan dan mengikhtisarkan kejadian ekonomi dalam keadaan yang logis untuk tujuan memberikan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.					

5	Auditor dituntut harus mengetahui standar audit untuk menguji kelayakan suatu laporan keuangan					
---	--	--	--	--	--	--

**c. Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)**

1	Setiap informasi dalam laporan keuangan disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga kekeliruan dan interpretasi dan penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.					
2	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujiannya dilakukan oleh pihak berbeda hasilnya tetap menunjukkan tidak beda jauh.					
3	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat membantu dalam memperkirakan aktivitas yang berhubungan dengan keuangan pada periode berikutnya.					
4	Laporan keuangan dapat membantu dalam pengambilan keputusan					
5	Informasi laporan keuangan yang akuntabel penting untuk mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK					

**Komentar:**

.....

.....

.....

.....



Sekian dan terima kasih

Lampiran 5

**TABULASI KUESIONER  
PROFESIONALISME (X1)**

Responden	item pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	5	4	4	5	4	22
2	5	4	4	5	4	22
3	5	4	4	4	4	21
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	4	5	4	23
6	5	4	4	4	5	22
7	5	4	5	4	4	22
8	5	5	5	4	4	23
9	5	4	4	5	5	23
10	4	5	5	4	4	22
11	5	5	5	4	4	23
12	5	4	5	3	3	20
13	5	4	3	4	4	20
14	5	5	5	4	4	23
15	4	4	3	4	5	20
16	5	4	5	5	4	23
17	4	4	4	4	4	20
18	4	5	5	4	4	22
19	5	5	5	5	4	24
20	4	4	4	4	4	20
21	5	4	5	5	5	24
22	5	4	4	4	4	21
23	5	3	5	3	4	20
24	4	4	4	4	5	21
25	5	4	5	5	4	23
26	5	5	4	4	4	22
27	5	4	4	4	5	22
28	4	5	5	4	4	22
29	5	4	4	5	4	22
30	5	5	5	4	3	22

**TABULASI KUESIONER  
PENGETAHUAN APARAT INSPEKTORAT (X2)**

Responden	item pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	4	5	4	4	4	21
6	4	4	4	3	4	19
7	4	4	4	4	3	19
8	4	4	4	3	4	19
9	4	4	4	4	4	20
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	4	5	4	4	4	21
13	4	4	5	4	4	21
14	4	4	4	5	4	21
15	4	4	4	4	5	21
16	4	4	4	4	4	20
17	4	4	4	5	4	21
18	4	4	5	4	4	21
19	4	5	4	4	4	21
20	4	4	4	4	4	20
21	4	4	4	4	4	20
22	4	4	4	4	4	20
23	4	5	4	4	4	21
24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	4	4	4	21
26	4	4	4	4	4	20
27	4	4	4	4	4	20
28	4	4	4	4	4	20
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	4	4	4	20

**TABULASI KUESIONER**  
**KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)**

Responden	item pertanyaan					Total
	1	2	3	4	5	
1	5	5	4	4	4	22
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	5	4	5	22
4	4	5	4	5	4	22
5	4	4	4	5	4	21
6	4	5	5	5	4	23
7	4	4	4	4	5	21
8	4	5	4	4	4	21
9	4	5	4	5	4	22
10	5	4	4	4	5	22
11	4	5	4	4	5	22
12	4	5	5	5	5	24
13	5	4	4	4	4	21
14	4	5	5	4	5	23
15	5	4	4	4	4	21
16	4	5	5	4	4	22
17	4	4	4	5	5	22
18	5	5	5	4	4	23
19	5	5	4	5	4	23
20	4	5	4	4	4	21
21	5	4	4	5	5	23
22	4	4	4	4	5	21
23	5	5	4	5	4	23
24	4	4	4	5	5	22
25	5	5	5	4	5	24
26	4	4	4	5	4	21
27	4	4	5	4	4	21
28	4	5	4	5	4	22
29	4	4	4	4	5	21
30	4	5	4	5	4	22

**HASIL OUTPUT SPSS 20**  
**UJI VALIDITAS INSPEKTORAT (X1)**

		Correlations					
		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006
VAR00001	Pearson Correlation	1000	-.086	.148	.252	-.141	.456*
	Sig. (2-tailed)		.651	.435	.179	.457	.011
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00002	Pearson Correlation	-.086	1000	.353	.102	-.279	.508**
	Sig. (2-tailed)	.651		.056	.591	.135	.004
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00003	Pearson Correlation	.148	.353	1000	-.078	-.394*	.509**
	Sig. (2-tailed)	.435	.056		.682	.031	.004
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00004	Pearson Correlation	.252	.102	-.078	1000	.247	.654**
	Sig. (2-tailed)	.179	.591	.682		.188	.000
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00005	Pearson Correlation	-.141	-.279	-.394*	.247	1000	.153
	Sig. (2-tailed)	.457	.135	.031	.188		.419
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00006	Pearson Correlation	.456*	.508**	.509**	.654**	.153	1000
	Sig. (2-tailed)	.011	.004	.004	.000	.419	
	N	30	30	30	30	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**HASIL OUTPUT SPSS 20**  
**UJI VALIDITAS PENGETAHUAN APARAT INSPEKTORAT (X2)**

**Correlations**

		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006
VAR00001	Pearson Correlation	1000	-.073	-.050	.000	.000	.231
	Sig. (2-tailed)		.702	.795	1.000	1.000	.219
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00002	Pearson Correlation	-.073	1000	-.105	.000	.000	.489**
	Sig. (2-tailed)	.702		.581	1.000	1.000	.006
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00003	Pearson Correlation	-.050	-.105	1000	.000	.000	.333
	Sig. (2-tailed)	.795	.581		1.000	1.000	.072
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00004	Pearson Correlation	.000	.000	.000	1000	.000	.593**
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	1.000		1.000	.001
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00005	Pearson Correlation	.000	.000	.000	.000	1000	.419*
	Sig. (2-tailed)	1.000	1.000	1.000	1.000		.021
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00006	Pearson Correlation	.231	.489**	.333	.593**	.419*	1000
	Sig. (2-tailed)	.219	.006	.072	.001	.021	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**HASIL OUTPUT SPSS 20**  
**UJI VALIDITAS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Y)**

		Correlations					
		VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006
VAR00001	Pearson Correlation	1000	.029	-.066	-.132	-.089	.347
	Sig. (2-tailed)		.878	.730	.486	.640	.060
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00002	Pearson Correlation	.029	1000	.262	.144	-.327	.559**
	Sig. (2-tailed)	.878		.162	.448	.077	.001
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00003	Pearson Correlation	-.066	.262	1000	-.223	.123	.511**
	Sig. (2-tailed)	.730	.162		.236	.517	.004
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00004	Pearson Correlation	-.132	.144	-.223	1000	-.165	.340
	Sig. (2-tailed)	.486	.448	.236		.384	.066
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00005	Pearson Correlation	-.089	-.327	.123	-.165	1000	.268
	Sig. (2-tailed)	.640	.077	.517	.384		.152
	N	30	30	30	30	30	30
VAR00006	Pearson Correlation	.347	.559**	.511**	.340	.268	1000
	Sig. (2-tailed)	.060	.001	.004	.066	.152	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

**HASIL OUTPUT SPSS 20**  
**UJI REALIBILITAS PROFESIONAL(X1)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.843	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	16.7667	2.737	.822	.763
VAR00002	16.7667	2.806	.773	.777
VAR00003	16.8667	3.292	.542	.838
VAR00004	16.9000	2.852	.638	.816
VAR00005	16.9667	3.206	.496	.852

**UJI REABILITAS PENGETAHUAN APARAT INSPEKTORAT (X2)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.874	5

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	17.4667	3.637	.507	.893
VAR00002	17.3000	3.045	.811	.819
VAR00003	17.4000	3.214	.724	.842
VAR00004	17.5000	3.362	.685	.852
VAR00005	17.5333	3.223	.801	.825

**UJI REABILITAS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH (Y)**

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.861	5

**Item-Total Statistics**

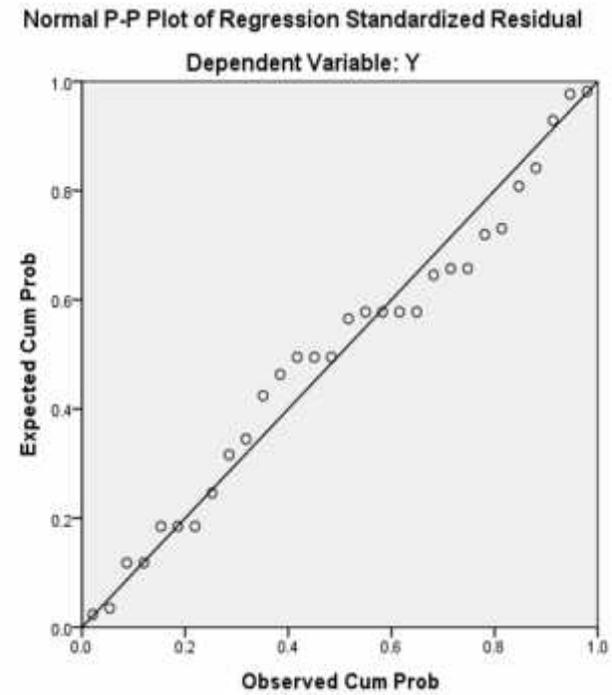
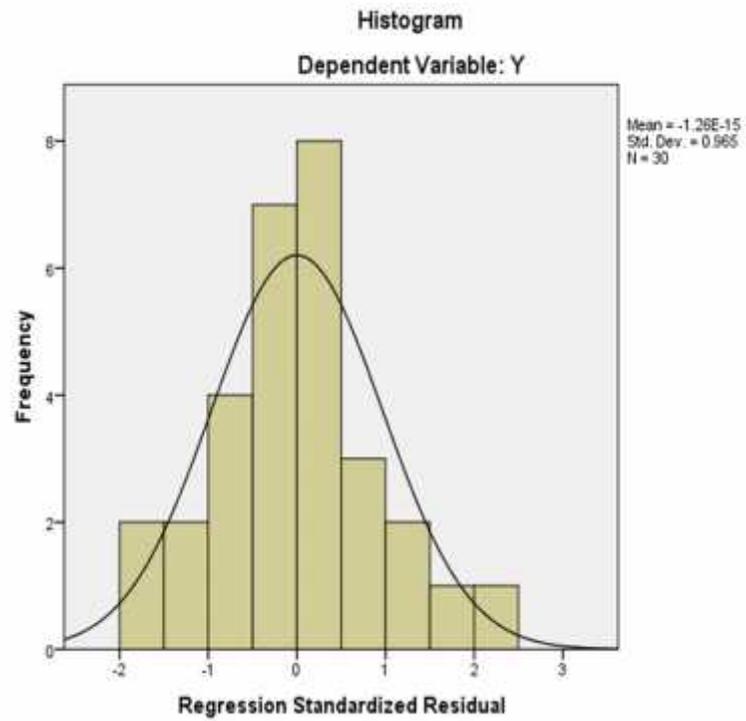
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
VAR00001	17.8333	2.971	.497	.875
VAR00002	18.0000	2.690	.663	.835
VAR00003	17.9667	2.723	.637	.842
VAR00004	18.0667	2.547	.789	.803
VAR00005	18.0000	2.483	.819	.794

Lampiran 8

HASIL OUTPUT SPSS 20

UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS

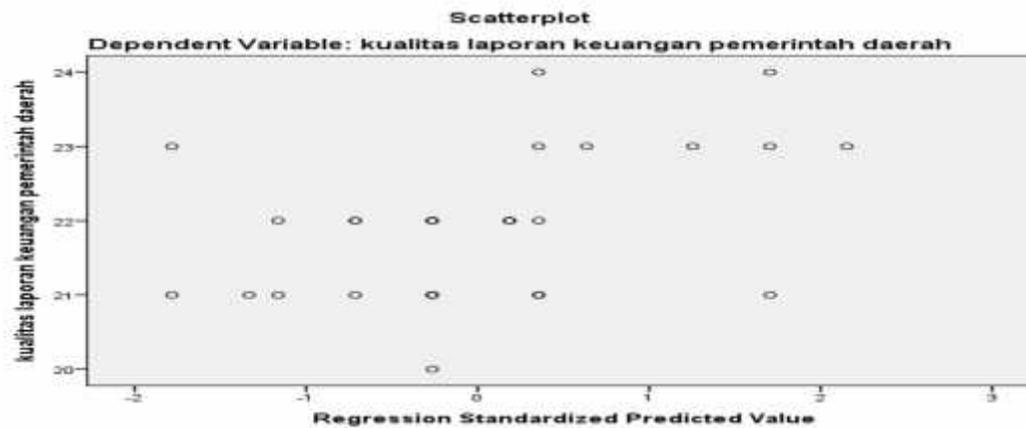


## 2. UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Profesionalisme	0.954	1.030
1 pengetahuan aparat inspektorat	0.958	1.043

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

## 3. UJI HETEROSKEDASITAS



Lampiran 9

HASIL OUTPUT SPSS 20

HASIL UJI ANALISIS REGRESI BERGANDA

1. UJI KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.434 <sup>a</sup>	.188	.128	.915	2.822

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Lampiran 10

1. UJI SIMULTAN ( UJI F )

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.251	2	2.626	3.135	.060 <sup>b</sup>
Residual	22.615	27	.838		
Total	27.867	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Lampiran 11

1. UJI PERSIAL ( UJI t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.684	6.909		.678	.504
X1	.191	.140	.243	1.370	.182
X2	.646	.277	.413	2.331	.027

a. Dependent Variable: Y

**Tabel Distribusi T**

<b><i>v</i></b>	<b><math>\alpha</math></b>				
	<b>0.005</b>	<b>0.01</b>	<b>0.025</b>	<b>0.05</b>	<b>0.1</b>
<b>1</b>	63.6567	31.8205	12.7062	6.3138	3.0777
<b>2</b>	9.9248	6.9646	4.3027	2.9200	1.8856
<b>3</b>	5.8409	4.5407	3.1824	2.3534	1.6377
<b>4</b>	4.6041	3.7469	2.7764	2.1318	1.5332
<b>5</b>	4.0321	3.3649	2.5706	2.0150	1.4759
<b>6</b>	3.7074	3.1427	2.4469	1.9432	1.4398
<b>7</b>	3.4995	2.9980	2.3646	1.8946	1.4149
<b>8</b>	3.3554	2.8965	2.3060	1.8595	1.3968
<b>9</b>	3.2498	2.8214	2.2622	1.8331	1.3830
<b>10</b>	3.1693	2.7638	2.2281	1.8125	1.3722
<b>11</b>	3.1058	2.7181	2.2010	1.7959	1.3634
<b>12</b>	3.0545	2.6810	2.1788	1.7823	1.3562
<b>13</b>	3.0123	2.6503	2.1604	1.7709	1.3502
<b>14</b>	2.9768	2.6245	2.1448	1.7613	1.3450
<b>15</b>	2.9467	2.6025	2.1314	1.7531	1.3406
<b>16</b>	2.9208	2.5835	2.1199	1.7459	1.3368
<b>17</b>	2.8982	2.5669	2.1098	1.7396	1.3334
<b>18</b>	2.8784	2.5524	2.1009	1.7341	1.3304
<b>19</b>	2.8609	2.5395	2.0930	1.7291	1.3277
<b>20</b>	2.8453	2.5280	2.0860	1.7247	1.3253
<b>21</b>	2.8314	2.5176	2.0796	1.7207	1.3232
<b>22</b>	2.8188	2.5083	2.0739	1.7171	1.3212
<b>23</b>	2.8073	2.4999	2.0687	1.7139	1.3195
<b>24</b>	2.7969	2.4922	2.0639	1.7109	1.3178
<b>25</b>	2.7874	2.4851	2.0595	1.7081	1.3163
<b>26</b>	2.7787	2.4786	2.0555	1.7056	1.3150
<b>27</b>	2.7707	2.4727	2.0518	1.7033	1.3137
<b>28</b>	2.7633	2.4671	2.0484	1.7011	1.3125
<b>29</b>	2.7564	2.4620	2.0452	1.6991	1.3114
<b>30</b>	2.7500	2.4573	2.0423	1.6973	1.3104

## HASIL UJI KOEFISIEN REGRESI 20

**Variables Entered/Removed<sup>a</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pengetahuan aparat inspektorat gowa, profesionalisme <sup>b</sup>		Enter

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. All requested variables entered.

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.434 <sup>a</sup>	.188	.128	.915	2.822

a. Predictors: (Constant), pengetahuan aparat inspektorat gowa, profesionalisme

b. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.251	2	2.626	3.135	.060 <sup>b</sup>
Residual	22.615	27	.838		
Total	27.867	29			

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

b. Predictors: (Constant), pengetahuan aparat inspektorat gowa, profesionalisme

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	4.684	6.909		.678	.504
1 profesionalisme	.191	.140	.243	1.370	.182
1 pengetahuan aparat	.646	.277	.413	2.331	.027
1 inspektorat gowa					

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

**Residuals Statistics<sup>a</sup>**

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	21.17	22.85	21.93	.426	30
Std. Predicted Value	-1.783	2.154	.000	1.000	30
Standard Error of Predicted Value	.179	.441	.278	.081	30
Adjusted Predicted Value	20.80	22.92	21.92	.451	30
Residual	-1.821	1.916	.000	.883	30
Std. Residual	-1.989	2.093	.000	.965	30
Stud. Residual	-2.029	2.253	.008	1.027	30
Deleted Residual	-1.924	2.219	.015	1.002	30
Stud. Deleted Residual	-2.163	2.453	.012	1.075	30
Mahal. Distance	.146	5.756	1.933	1.582	30
Cook's Distance	.000	.325	.046	.083	30
Centered Leverage Value	.005	.198	.067	.055	30

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

